PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
JL.SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21536/221990.
www.luwuutarakab.go.id. Masamba, kode pos 92961

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/506/DiskominfoSP/X/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentag Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik .

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor: 005/215/Diskominfo Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 005/215/Diskominfo Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran II (Dua) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 29 Oktober 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID,

JUMAL JAYAIR LUSSA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/506/DiskominfoSP/X/2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Biodata Elektronik ASN (DATABASE)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
4	Daftar nilai DP3/SKP PNS	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h 3. PP No. 11 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	Data rekam medis PNS	1. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. UU No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 47 3. Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/IIIII/2008 Pasal 12 dan 13	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H 2. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No.100 Tahun 2000	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu,menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas,keamanan dan kapasitas hukum	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	1. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
8	Daftar Username dan Password Website SKPD	UU No.11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
9	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
10	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan	Perpes No. 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan barang	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
11	Dokumen penawaran kontrak	Perpes No. 16 Tahun 2008 tentang	Selama proses	Mengakibatkan persaingan	Bisa menjaga keakuratan	Dikecualikan/ Semua

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	pengadaan barang dan jasa	pengadaan barang dan jasa	pengadaan barang dan jasa	yang tidak sehat	dan obyekvitas penilaian	SKPD/Kec/Kel
12	Laporan penggunaan dana kegiatan swakelola/tender	Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa	Selama proyek kegiatan belum diaudit APIP/ persentase eksternal	Mengganggu proses tahapan pelaksanaan proyek/kegiatan	Dapat memperlancar proses audit internal	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
13	Kode akses/password aplikasi elektronik : SIMRAL/e-Planing, e-RFK, FMIS, SIPD, SIRUP	UU No.11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
14	Surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
15	Kode akses elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
16	Laporan keuangan yang belum diaudit	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
17	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Dikecualikan/ DISKOMINFO
18	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Dikecualikan/ DISKOMINFO
19	Penempatan jaringan, peralatan sandi, dan tempat kegiatan sandi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Dikecualikan/ DISKOMINFO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		kearsipan				
20	Jalur Komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ DISKOMINFO
21	C Panel/Source Code (Bahasa Pemrograman)	UU No.11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ DISKOMINFO
22	Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019	Tidak Terbatas	Mencegah perubahan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ DISKOMINFO
23	Pengelolaan Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 tentang alat pendukung utama persandian	Tidak Terbatas	Mencegah perubahan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ DISKOMINFO
24	Alat Persandian Utama	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 11 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan kunci sistem sandi	Tidak Terbatas	Mencegah perubahan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ DISKOMINFO
25	Kunci SistemSandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 10 Tahun 2010 tentang standar tempat kegiatan sandi	Tidak Terbatas	Mencegah perubahan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ DISKOMINFO
26	Tempat Kerja Sandi/ Kirim Terima Berita	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 10 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah	Tidak Terbatas	Mencegah perubahan data	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ DISKOMINFO
27	Kode Akses Admin dan User Website Utama Pemda, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Puskesmas	UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Perpres 59 Tahun 2018	Selama password/kode berlaku	Dapat disalahgunakan/ dihacker	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ DISKOMINFO
28	Kode Akses Pengelolaan Domain, Subdomain, Email Resmi dan Hosting Pemkab Luwu Utara	UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Perpres 59 Tahun 2018	Selama password/kode berlaku	Dapat disalahgunakan/ dihacker	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ DISKOMINFO
29	Kode Akses Pengelolaan Jaringan	UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan	Selama	Dapat disalahgunakan/	Integritas Jaringan dan	Dikecualikan/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	LAN/WAN Ruang Network Operation Center (NOC) Kab. Luwu Utara	Perpres 59 Tahun 2018	password/kode berlaku	dihacker	Layanan	DISKOMINFO
30	IP Local / Publik Network	UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Perpres 59 Tahun 2018	Selama password/kode berlaku	Dapat disalahgunakan/ dihacker	Integritas Jaringan dan Layanan	Dikecualikan/ DISKOMINFO
31	Kode Akses Pengelolaan dan Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) Kab. Luwu Utara	UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Perpres 59 Tahun 2018	Selama password/kode berlaku	Dapat disalahgunakan/ dihacker	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ DISKOMINFO
32	Kode Akses Pengelolaan Server/ Hosting Ruang Komputasi/ Ruang Kendali Kab. Luwu Utara	UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Perpres 59 Tahun 2018	Selama password/kode berlaku	Dapat disalahgunakan/ dihacker	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ DISKOMINFO
33	Data Penduduk By Name By Address (Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Keterangan tentang cacat fisik/mental dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang)	UU No. 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 Ayat (1)	Tidak Terbatas	Berisi Data Perseorangan Rentan Pemalsuan Identitas	Keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi yaitu By Name By Address wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	Dikecualikan/ DISDUKCAPIL
34	Perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	1. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 2. Permendagri No. 5 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Tidak Terbatas	• Penonaktifan Pengguna SIAK • Membahayakan Basis Data Kependudukan • Pemutusan Jaringan Komunikasi Data	Mengamankan dan melindugi Basis Data Kependudukan	Dikecualikan/ DISDUKCAPIL
35	Laporan Hasil Pemerikasaan LHP	Bagian Kelima Pelaporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 23 (1) (2). PP No.12 Thn 2017. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Tidak Terbatas	Data Perseorangan Hasil Pemeriksaan Khususnya Kerugian Negara/ Daerah.	Kerahasiaan Hasil Pemerikasaan Disimpan.	Dikecualikan/ INSPEKTORAT, DISDIKBUD, BPBD, KEC
36	Reviuw	Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI No.063/AAIPI/DPN/2018	Tidak Terbatas	Bisa Saja Hal Itu Benar Terjadi Atau Hanya Cerita	Kerahasiaan Hasil Laporan Disimpan	Dikecualikan/ INSPEKTORAT, DISDIKBUD
37	Laporan Aduan Masyarakat		Tidak Terbatas	Mengungkap Kerahasiaan	Kerahasiaan Hasil Laporan	Dikecualikan/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				Hasil Laporan	Disimpan	INSPEKTORAT, DISDIKBUD, BKPSDM
38	Draf Mutasi Jabatan Eselon II, III,IV dan Staf	PP 11 tahun 2017 tentang Managemen PNS	Setelah pelantikan	Mengungkap Kerahasiaan Data Mutasi	Menjaga Kerahasiaan Data Mutasi	Dikecualikan/ BKPSDM
39	Pemberhentian ASN	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ BKPSDM
40	Nilai Job Fit bagi JPT Pratama dan Seleksi Terbuka	PP 11 tahun 2017 tentang Managemen PNS	Tidak Terbatas			Dikecualikan/ BKPSDM
41	Hasil Tes Talent Pool	PP 11 tahun 2017 tentang Managemen PNS	Tidak Terbatas			Dikecualikan/ BKPSDM
42	Laporan hasil pemeriksaan aparat/ pejabat fungsional, pengawas baik internal maupun eksternal	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah 3. PP No. 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 4. Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah 5. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit pengawasan intern pemerintah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawasan dan kode etik pejabat	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dikecualikan/ BKPSDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		pemerintah, lampiran I Bab norma pelaporan huruf a				
43	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h 3. UU No. 13 Tahun 2011 Pasal 8, 9, 10, 11	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi masyarakat yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi masyarakat yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ DINSOS
44	Data Hasil Assesment Laporan Psiko Sosial (Lapsos) Anak Berhadapan Hukum (ABH)	1. UUD No.35 Tahun 2014 tentang Perbahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 Ayat 1 dan 2	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi korban tindak asusila atau kekerasan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi korban tindak asusila atau kekerasan yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ DINSOS
45	Data Penyandang HIV dan AIDS	1. UU No. 36 Tahun 2009 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi penderita HIV dan AIDS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi penderita HIV dan AIDS yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ DINSOS
46	Data Penyalahgunaan NAPZA	1. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2. UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi pengguna atau korban NAPZA yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pengguna atau korban NAPZA yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ DINSOS
47	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan pertanggungjawaban Dana Desa	PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menghambat kegiatan desa yang sementara berjalan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang dan aktivitas di desa yang berjalan lancar	Dikecualikan/ DPMD
48	Kode Akses Siskeudes	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Konsistensi dokumen desa	Dikecualikan/ DPMD
49	Notulen Rapat Berdasarkan Sifatnya	UU N0. 14 Tahun 2008 pasal 17	Tidak Terbatas	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang	Melindungi dan mengamankan data	Dikecualikan/ DPMD
50	Dokumen Perjanjian Kerjasama yang Dikecualikan	UU N0. 14 Tahun 2008 pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat merugikan kepentingan keduabelah	Melindungi dan mengamankan data	Dikecualikan/ DPMD
51	Kode Registrasi Data Pokok	UU No.11 Tahun 2008 tentang	Selama kode	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa	Dikecualikan/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pendidikan (DAPODIK)	Informasi dan Transaksi Elektronik ITE	registrasi berlaku		terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	DISDIKBUD
52	Data Rinci Peserta Didik	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE	Tidak Terbatas	Berisi data perseorangan rentan pemalsuan identitas	Keamanan dan kerahasiaan data by name by address wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	Dikecualikan/ DISDIKBUD
53	Data Rinci Pendidik dan Tenaga Kependidikan	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE	Tidak Terbatas	Berisi data perseorangan rentan pemalsuan identitas	Keamanan dan kerahasiaan data by name by address wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	Dikecualikan/ DISDIKBUD
54	Perangkat Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE	Tidak Terbatas	Menghambat proses pelayanan	Mengamankan dan melindungi basis Data Pokok Pendidikan	Dikecualikan/ DISDIKBUD
55	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS, BOP, dan BOK Kesetaraan	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	Dikecualikan/ DISDIKBUD
56	Laporan Dana BOS, BOP, dan BOK Kesetaraan Keuangan yang belum diaudit	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan		Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan	Dikecualikan/ DISDIKBUD
57	Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Pre-tes Pendidikan Profesi Guru (PPG)	PP 11 Tahun 2017 tentang Managemen PNS	Setelah Diklat PPG	Mengakibatkan persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian	Dikecualikan/ DISDIKBUD
58	Hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah	PP 11 Tahun 2017 tentang Managemen PNS	Setelah Diklat Cakep	Mengakibatkan persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian	Dikecualikan/ DISDIKBUD
59	Data Hasil Uji Laboratorium Keswan	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 Huruf b	Terbatas Dengan Persetujuan	Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Tidak memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat	Dikecualikan/ DISTAN
60	Hasil Pengujian Laboratorium	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat menimbulkan	Dapat menimbulkan	Dikecualikan/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	Huruf b		persaingan tidak sehat	persaingan yang sehat	DISTAN
61	Usulan Pelepasan Varietas Baru	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b 2. Permenpan No. 37/Permenpan/OT.140/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas	Setelah Varietas dilepas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas kemungkinan bisa dilepas pihak lain atau negara lain	Mencegah varietas baru diambil oleh pihak lain	Dikecualikan/ DISTAN
62	Hasil Analisis Mutu Pestisida/ APH yang sedang dikerjakan di laboratorium	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b	Setelah Proses Selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu	Dikecualikan/ DISTAN
63	Penangan konflik sosial yang masih dalam proses hukum	PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Bisa menimbulkan pesoalan baru	Proses penyelesaian konflik bisa cepat	Dikecualikan/ BAKESBANGPOL
64	Pelaku kejahatan lainnya yang masih dalam proses hukum oleh pihak yang berwajib	PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Bisa menimbulkan pesoalan baru	Proses penyelesaian konflik bisa cepat	Dikecualikan/ BAKESBANGPOL
65	Laporan dan Hasil Rapat Koordinasi Tim Penanganan Konflik Sosial	PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Bisa menimbulkan pesoalan baru	Proses penyelesaian konflik bisa cepat	Dikecualikan/ BAKESBANGPOL
66	Laporan dan Hasil Rapat Koordinasi FORKOPIMDA	PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Bisa menimbulkan pesoalan baru	Proses penyelesaian konflik bisa cepat	Dikecualikan/ BAKESBANGPOL
67	Laporan dan Hasil Rapat Koordinasi Tentang Intelegen Daerah (KOMInDA)	PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Bisa menimbulkan pesoalan baru	Proses penyelesaian konflik bisa cepat	Dikecualikan/ BAKESBANGPOL
68	Laporan dan Hasil Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Bisa menimbulkan pesoalan baru	Proses penyelesaian konflik bisa cepat	Dikecualikan/ BAKESBANGPOL
69	Laporan dan Hasil Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Bisa menimbulkan pesoalan baru	Proses penyelesaian konflik bisa cepat	Dikecualikan/ BAKESBANGPOL
70	Identitas Korban Kasus KDRT	1. UU No. 39 tahun 1999 tentang has asasi manusia 2. UU No. 13 tahun 2006 tentang	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang menjadi privasi korban	Melindungi Privasi korban	Dikecualikan/ DP3AP2KB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		perlindungan has asasi korban				
71	Data Klien Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	UU No. 35 Tentang Perlindungan Anak	Tidak Terbatas	Dapat menyebabkan gangguan psikis, Gangguan tumbuh kembang anak dan psikologis anak setelah beranjak dewasa	Melindungi Hak Asasi Klien (Perempuan dan Anak)	Dikecualikan/ DP3AP2KB
72	Informasi Data Keluarga	• UU Nomor 52 Tahun 2009 • Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data keluarga/ warga masyarakat yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ DP3AP2KB
73	Data Identitas Akseptor KB	Ketentuan Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 17 UU KIP, sesuai hasil pengujian	Ditetapkan berdasarkan Uji Konsekuensi	Risiko terbukanya informasi pribadi	Melindungi data keluarga/ warga masyarakat yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ DP3AP2KB
74	Rekam Medis Peserta Pelayanan KB	Ketentuan Kerahasiaan Informasi Kesehatan dan Pasal 17 UU KIP	Ditetapkan berdasarkan Uji Konsekuensi	Terungkapnya Rahasia Kesehatan Individu	Melindungi data keluarga/ warga masyarakat yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ DP3AP2KB
75	Identitas Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Ketentuan Perlindungan Korban, Anak dan Data Pribadi	Sesuai Ketentuan yang berlaku	Risiko Keselamatan dan Terbukanya Identitas Korban	Melindungi data keluarga/ warga masyarakat yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ DP3AP2KB
76	Kredensial Akses Aplikasi dan Basis Data	Ketentuan Keamanan Informasi yang relevan	Berdasarkan Hasil Pengujian	Risiko Penyalahgunaan Akses dan Kebocoran Data	Melindungi data keluarga/ warga masyarakat yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ DP3AP2KB
77	Laporan Hasil Kekayaan Pejabat yang belum di umumkan dalan Berita Negara	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 5 ayat (7) Keputusan KPK Nomor Kep. 07/KPK/02/2025 tentang Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Hasil Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat Rahasia	Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi	Dikecualikan/ Bapperida
78	Laporan Pajak Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat Rahasia	Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi	Dikecualikan/ Bapperida
79	Rencana Kerja Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Selama proyek belum diaudit APIP	Memperlambat proses tahapan proyek	Penyusunan perencanaan lebih terfokus	Dikecualikan/ DPUTRPKP2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

80	Kode akses/password aplikasi elektronik : INLISLITE, SIM Transformasi, Pendataan Perpustakaan	UU No.11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ DISPERSIPDA
81	Laporan hasil pemeriksaan aparat/pejabat fungsional pengawas, baik internal maupun eksternal	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah 3. PP No. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 4. Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah 5. Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit pengawasan intern pemerintah 6. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawasan dan kode etik pejabat pemerintah, Lampiran I BAB norma pelaporan huruf a	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dikecualikan/ DINKES, RSUD
82	Data hutang pasien kepada rumah sakit	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Dikecualikan/ RSUD
83	Dokumen/ Berkas/ Arsip Pegawai	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10)	Tidak Terbatas	1. Mengungkap data pribadi pegawai 2. Dapat merugikan pegawai 3. Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia dan untuk melindungi keamanan dan kenyamanan pegawai	Dikecualikan/ RSUD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

84	Kegiatan rahasia trantib dan penanganan kasus yang mengganggu masyarakat seperti organisasi masyarakat yang tidak sesuai Peraturan Perundang Undangan	1. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 26 2. Permendagri No. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Tidak Terbatas	Dapat terdeteksi dini oleh pihak-pihak yang mengganggu masyarakat dan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	Menjaga ketertiban dan pertahanan keamanan	Dikecualikan/ Kec
85	Dokumen penyelasaian sengketa/konflik tanah	UU No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	Sampai dengan penyelesaian sengketa/ konflik tanah	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Dikecualikan/ Kec
86	Data obyek pajak dan retribusi	1. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan bagian dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 3. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah	Tidak Terbatas	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi	Dikecualikan/ Kec
87	Usulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa	UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa				Dikecualikan/ Kec
88	Keterangan Ahli Waris					Dikecualikan/ Kec
89	Data Penerima Bantuan Program Pemerintah	Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai	Tidak Terbatas	Berisi data penerima yang akan diverifikasi	Dokumen terjaga kerahasiaannya	Dikecualikan/ Kec
90	LPJ Realisasi Dana Desa	1. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 2. Peraturan Desa No. 1 Tahun 2023 tentang LPJ APB Desa Tahun Anggaran 2022	Tidak Terbatas	Menjaga proses pnyelesaiaan/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ Kec
91	Laporan kegiatan pembangunan di Kelurahan/Desa yang bermasalah	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Permasalahan dan Pengawasannya	Tidak Terbatas	Menjaga proses pnyelesaiaan/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ Kec
92	Sengketa Tanah (Ganti Rugi	Peraturan Menteri Agraria dan Tata	Tidak Terbatas	Menjaga proses	Melindungi kerahasiaan	Dikecualikan/ Kec

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Garapan dan Alas Hak) dan Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah	Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan		penyelesaian/kebijakan	dokumen	
93	Sengketa Rumah Tangga (Perceraian)	1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam (KHI)	Tidak Terbatas	Menjaga proses penyelesaian/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ BKPSDM, Kec
94	Surat Rahasia	1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan J	Tidak Terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Dikecualikan/ Kec
95	Dokumen Laporan/ Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Berikut Lampirannya	1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf I dan J	Sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan yang telah diaudit	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Dikecualikan/ Kec
96	Data Pribadi Kependudukan Staf Kecamatan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf I 2. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 & 84	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/ Kec
97	Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan	UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Tidak Terbatas	Mengakibatkan dampak psikologis	Melindungi nama baik	Dikecualikan/ Kec

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 29 Oktober 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID

JUMAL JAYAIR LUSSA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/506/DiskominfoSP/X/2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BERITA ACARA

UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR: 005/215/DiskominfoSP

Pada hari Kamis, 29 Oktober 2026 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Luwu Utara, yang diikuti oleh 27 OPD dan 7 Kecamatan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Hasil Uji Konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 97 informasi dinyatakan dikecualikan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 29 Oktober 2026

Tim Penguji (Terlampir Absensi)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KABUPATEN LUWU UTARA

Masamba, 26 Oktober 2026

Nomor : 500.12/192/DISKOMINFOSP
Lamp : -
Hal : ***Rapat Uji Konsekuensi***

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan OPD
2. Kabag. Hukum Kab. Luwu Utara
3. Kabag. Pengadaan Barang & Jasa (ULP) Kab. Luwu Utara
4. Para Camat
Masing - masing
Di -
Tempat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi di lingkup kabupaten Luwu Utara dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka untuk menyatukan persepsi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Kominfo SP mengundang Saudara(i) agar menghadiri kegiatan Rapat Uji Konsekuensi terhadap daftar informasi publik yang dikecualikan, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 29 Oktober 2026
Pukul : 08.30 Wita - selesai
Tempat : Ruang Rapat Wakil Bupati Luwu Utara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI LUWU UTARA
Pj. SEKRETARIS DAERAH

JUMAL JAYAIR LUSSA

Tembusan:
1. Bupati Luwu Utara;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Kamis, 29 Oktober 2026
WAKTU : 08.30 – Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Wakil Bupati Luwu Utara
PERIHAL : Rapat Uji Konsekuensi

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	PARAF
1		Asisten II	SETDA	
2	Andi Zulkarnain	Kadis Kominfo	DISKOMINFO	
3	ARMIDA	Staf	DPMD	
4	SITTI Halifah	staf	BAKESBANGPOL	
5	Ratnasari	Kasubag Umum	BPBD	
6	Hartini	Staf	BAPENDA	
7	[illegible]	Plt	DP3AP2KB	
8	EKADIANA	Analis SDMA Pertama	BKPSDM	
9	Jufriadi	Analis SDMA Pertama	BKAD	
10	iswanto	Sek. Bapperida	BAPPERIDA	
11	ANISA FITRI IRIANI,	STAF.	DISHUB	
12	WIWINARTI	Kasubag Umum	DPKP	
13	~~NURAINI~~ NIKEN	~~Kabid~~ ~~HL~~ Staf	DISTRANKER	
14	~~[illegible]~~ FITRIANTI	~~[illegible]~~ Sekretaris	DLH	
15	Hanita	Kabag	DPMPTSP	
16	~~Mudalifah~~ Baso	Sekdistan	DISTAN	
17	HUSNAH USMAN	Kasubag umum & kepeg	DP2KUKM	
18	FRIANTI	Staf	~~DINSOS~~ DPUTRPKP2	
19	RUSTAN	KABID. PM	~~DPUPR~~ DINSOS	
20	Salman	kepegawaian	SATPOL PP	
21	SALMA A. TAISANG	SEKRETARIS	DISDUKCAPIL	
22	LUKMAN SYAHRIR	KASUBAG PERENCANAAN	INSPEKTORAT	
23	Khaerul M.	Sekbis	DINKES	
24	Melkyanus	Staf Setwan	SEKRETARIAT DEWAN	
25	Ismail	Staf	DISDIKBUD	
26	Asseng, S.Sos	[illegible]	DISPORAPAR	

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	PARAF
27	MUH. IQBAL M	PLT KABAG ADM	RSUD	
28			BAG. HUKUM SETDA	
29			BAG. PBJ SETDA	
30			KEC. MASAMBA	
31			KEC. BAEBUNTA	
32			KEC. BAEBUNTA SELATAN	
33	ADRIANA. UMAR.	SEKCAM	KEC. SABBANG	
34			KEC. SABBANG SELATAN	
35	SAHAR	Kasubag.	KEC. MALANGKE	
36	Deritawati	Kasubag	KEC. MALANGKE BARAT	
37			KEC. MAPPEDECENG	
38			KEC. SUKAMAJU	
39	Nuraniyah	Sekcam	KEC. SUKAMAJU SELATAN	
40	TUTI WIDIASTI ANAS	SEKCAM	KEC. BONE - BONE	
41			KEC. TANA LILI	
42			KEC. SEKO	
43	NIRWAN SAKIR		KEC. RONGKONG	
44			KEC. RAMPI	
45.	ISNAENI M.	KABID IKP	DISKOMINFO	

Pimpinan Rapat,

MUH. KASRUM


PPID
RAPAT UJI KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN
PPID LUWU UTARA
29 Oktober 2026

